

PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENIPUAN ONLINE DI KECAMATAN WATTANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Aldy Alimuddin*, ²⁾Kamaruddin Sellang, ³⁾Lukman

^{1), 2), 3).} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾aldyalimuddin722@gmail.com ²⁾kamaruddisellang@gmail.com

³⁾lukmansidrap75@gmail.com

* aldyalimuddin722@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku Birokrasi Pemerintah Terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan Penipuan Online Di Kecamatan Wattang Sidenreng dan Penelitian hanya dapat dilakukan pada populasi yang jumlahnya terhingga saja. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah kartu keluarga di Wattang Sidenreng yaitu 7.440 kk. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Random Sampling* atau sampling acak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabel frekuensi dan uji kualitas data dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 21.

Hasil penelitian ini menyatakan Implementasi Kebijakan di Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki hasil persentase 47% berada pada kategori kurang baik dengan demikian indikator implementasi kebijakan dalam bentuk karakteristik organisasi pelaksana jauh lebih rendah yakni sebesar 44% karena pemerintah dan kepolisian kurang komunikasi tentang penipuan online. Perilaku Birokrasi di Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki rata-rata persentase yaitu 48% dengan kategori kurang baik. Hubungan Implementasi dan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan Online di Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 48% dikategorikan "Cukup Berpengaruh/Signifikan".

Kata Kunci : Perilaku Birokrasi pemerintah dan Implementasi Kebijakan Penanganan Penipuan Online.

Abstract

The purpose of this study was to find out the behavior of the government bureaucracy towards the implementation of online fraud handling policies in Wattang Sidenreng sub-district and research can only be done on a limited number of populations. In this study, the population was the number of family cards in Wattang Sidenreng, namely 7,440 families. The sample to be used in this study uses a probability sampling technique. This sample is taken using the Random Sampling technique or random sampling. This type of research is descriptive quantitative. Data collection techniques used in this study were literature study, observation, and questionnaires. The data analysis technique used was frequency table analysis and data quality testing with the help of the IBM SPSS Statistics 21 program.

The results of this study indicate that the behavior of the government bureaucracy towards the implementation of online fraud handling policies in Wattang Sidenreng sub-district is said to have a significant influence with a percentage of 48%. The Policy Implementation Indicators in Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, have a percentage of 47% in the unfavorable category. Indicators of Bureaucratic Behavior in Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency have an average percentage of 48% in the unfavorable category. The Relationship between Implementation and Effectiveness of Handling Online Fraud Cases in Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, amounting to 48% is categorized as "Quite Influential/Significant".

Keywords: *Government Bureaucratic Behavior and Implementation of Online Fraud Handling Policies.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umu dan tinjauan pustaka sebagai dasar pertanyaan penelitian baru, Pemerintahan Kecamatan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: kreatifitas (*creativity*), Inovasi (*innovasi*), Responsifitas (*responsivity*).

Petentuan Pasal 378 kitab undang undang hukum pidana (KHUP) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun ,selanjutnya pada UU ITE Pasal 28 ayat (1) menjelaskan orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat dan budaya serta lingkungan di mana individu berada. Oleh karena itu, setiap individu akan sangat berbeda kualitasnya dengan perilakunya dalam suatu organisasi tergantung pada kualitas lingkungannya. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik kualitas perilaku individu yang diperankannya dalam organisasi dan sebaliknya semakin buruk kualitas lingkungan individu sehari-hari, maka kecenderungan kualitas individu akan memburuk pula (Purba et al., 2020) Perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu baik yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada (Purba et al., 2020).

Perilaku birokrasi timbul sebagai akibat interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi. Adapun Robbins (2003 : 31) menjelaskan bahwa : “Perilaku mengarah kepada pencapaian tujuan dalam organisasi. Salah satu fungsi birokrasi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.

Van Meter and Van Horn (1975), mendefenisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan.

Bentuk penipuan berbasis elektronik Penipuan berbasis elektronik ada banyak macamnya salah satunya yaitu phishing. phishing merupakan contoh upaya penipuan dengan berbasis elektronik dan menggunakan jaringan internet. Phishing banyak dilakukan oleh seseorang melalui email dan website. Tujuan dari phishing yaitu agar seseorang memberikan informasi pribadinya kepada pihak penipu dengan memanfaatkan kredibilitas dari perusahaan ternama seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan perbelanjaan online dan lain sebagainya. Informasi tersebut digunakan untuk mengambil keuntungan dari korban penipuan tanpa sepengetahuan korban penipuan tersebut (Ana Miftahul Jannah n.d.)

METODE

Penelitian ini dapat digolongkan dari beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jenis penelitian ini berdasarkan hasil yang ingin dicapai yaitu penelitian dasar. Jenis penelitian menurut metode yang akan digunakan yaitu penelitian survey. Menurut (Sugiyono, 2015: 11)metode

survey adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. Menurut (Hartono, 2015: 46) populasi dengan karakteristik tertentu ada yang jumlahnya terhingga dan ada yang tidak terhingga. Penelitian hanya dapat dilakukan pada populasi yang jumlahnya terhingga saja. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah kartu keluarga di Wattang Sidenreng yaitu 7.440 kk. Berdasarkan tabel yount, jika besar populasi berada di antara deretan 0-100, maka rumus yang digunakan yaitu mengalikan jumlah populasi dengan besarnya sampel yakni 1% sehingga didapatkan hasil 74. jadi sampel dan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 74 masyarakat/responden.

Berupaya menguji teori serta menggambarkan secara umum hubungan Perilaku Birokrasi Pemerintah terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan Penipuan Online di Kecamatan Attang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Observasi, Kuesioner, dan Studi Pustaka. Serta menggunakan teknik analisis data berdasarkan bantuan program SPSS for windows, hasil analisis berupa instrument skala pengukuran, uji kualitas data, Model Regresi serta Pengujian Hipotesis.

Berdasarkan dari output di atas untuk menguji tingkat validitas data adalah dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} . Y1 memperoleh nilai $0,401 > 0,194$, Y2 memperoleh nilai $0,409 > 0,194$, Y3 memperoleh nilai $0,443 > 0,194$, Y4 memperoleh nilai $0,575 > 0,194$, Y5 memperoleh nilai $0,573 > 0,194$, Y6 memperoleh nilai $0,513 > 0,194$ sehingga dapat disimpulkan bahwa keenam item pertanyaan tentang Perilaku Birokrasi dikatakan valid.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Indikator Implementasi Kebijakan

Indikator Sumber Daya Manusia	Persentase
Implementasi kebijakan dalam bentuk sumber dan tujuan	46%
Implementasi kebijakan dalam bentuk sumber daya	48%

Implementasi kebijakan dalam bentuk karakteristik organisasi pelaksana	44%
Implementasi kebijakan dalam bentuk komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan	46%
Implementasi kebijakan dalam bentuk sikap para pelaksana	48%
Implementasi kebijakan dalam bentuk kondisi ekonomi, sosial dan politik	50%
Jumlah	282
Rata-rata persentase $282/6=47\%$	

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner, Juni 2023

Dari tabel 4.rekapitulasi indikator implementasi kebijakan, maka didapatkan hasil rata-rata persentasi yaitu 47%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “Kurang Baik”.

Jika dilihat tabel 4.rekapitulasi indikator implementasi kebijakan, Implementasi kebijakan dalam bentuk karakteristik organisasi pelaksana jauh lebih rendah yakni hanya sebesar 44% dibandingkan dengan Implementasi kebijakan dalam bentuk sumber dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan, sikap para pelaksana dan Implementasi kebijakan dalam bentuk kondisi ekonomi sosial dan politik.

Rekapitulasi Indikator Perilaku Birokrasi

Indikator Sumber Daya Manusia	Persentase
Perilaku Birokrasi dalam bentuk Kesopanan	46%
Perilaku Birokrasi dalam bentuk Keadilan	52%
Perilaku Birokrasi dalam bentuk Kepedulian	50%
Perilaku Birokrasi dalam bentuk Kedisiplinan	54%
Perilaku Birokrasi dalam bentuk Kepekaan	50%
Perilaku Birokrasi dalam bentuk Tanggung Jawab	50%
Jumlah	290
Rata-rata persentase $290/6=48\%$	

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner, Juni 2023

Dari tabel 4.rekapitulasi indikator implementasi kebijakan, maka didapatkan hasil rata-rata persentasi yaitu 48%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “Kurang Baik”.

Jika dilihat tabel 4.rekapitulasi indikator implementasi kebijakan, Perilaku Birokrasi dalam bentuk Kesopanan jauh lebih rendah yakni hanya sebesar 46% dibandingkan dengan Perilaku Birokrasi dalam bentuk Keadilan, Kepeduliaan, Kedisiplinan, Kepekaan dan Perilaku Birokrasi dalam bentuk Tanggung Jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. perilaku birokrasi Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki hasil persentase 47% berada pada kategori kurang baik. . di ukur dari 6 indikator dan di antara 6 indikator tersebut ditemukan salah satu indikator yang kurang optimal yaitu kesopanan jumlah persentase nya 46% dikarenakan pihak pemerintah dan pihak kepolisian tidak memperhatikan kenakalan penipuan online di kecamatan watang sidenreng
2. Implementasi kebijakan Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki rata-rata persentase yaitu 48% dengan kategori kurang baik . di ukur dari 6 indikator dan di antara 6 indikator tersebut ditemukan salah satu indikator yang kurang optimal yaitu komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan jumlah persentase yaitu 44% dikarenakan pihak pemerintah dan pihak kepolisian kurang berkomunikasi tentang penipuan online
3. Hubungan Implementasi dan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan Online di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 48% dikategorikan "Cukup Berpengaruh/Signifikan" . di ukur dari 6 indikator dan di antara 6 indikator tersebut ditemukan salah satu indikator yang kurang optimal yaitu komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan jumlah persentase yaitu 44% dikarenakan pihak pemerintah dan pihak kepolisian kurang memberikan informasi lebih jelas tentang penipuan online ke masyarakat di kecamatan watang sidenreng rappang.

REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- _____. 2011. *Perilaku Birokrasi dalam Pengambilan Keputusan*. Universitas Negeri Makassar : Makassar
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* , 1-11.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

- Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos* , 65-85.
- Ibrael, R. (2008). *KEJAHATAN PENIPUAN BISNIS ONLINE* , 7.
- PLANGITEN, STEVAN R. SEWA JOHNY.H. POSUMAH NOVVA N.;. (2022). PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Vol. VIII*, 71.
- Saputra, R. F. (2013). Studi Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Di Puskesmas Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *E Journal. ip. fisip-unmul. org* , 41-45.
- Sekaran, U. (2011). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- STEVAN R. SEWA JOHNY.H. POSUMAH NOVVA N. PLANGITEN. (2022). PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Vol. VIII*, 71.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Susilawati1, E. (2020). Impelementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS pada. *Vol.1, No.1*, 4.
- Susilawati1, E. (2020). Impelementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS pada. 7.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/eman/2006/jiunkpe-ns-s1-2006-31402081-5961-laser_one-chapter2.pdf
- Kurnia Athuhema, Daniel. "STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI ONLINE SHOP." (2015): 1-11.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syofian, S. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Prenadamedia Group.Jakarta.
- Abdul Halim Barkatullah. n.d. "*Hukum Transaksi Eletronik*." in (Bandung: Nusa Media, 2017).

Ana Miftahul Jannah. n.d. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*" in (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 62.

Ananda, S. 2009. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." in *Kartika*, 2009. Surabaya.

Moeljatno. n.d. "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." in *Bumi Aksara*, 2007. Jakarta.

Richardus Eko Indrajit. n.d. "E-Commerce Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya." in (*Jakarta: Gramedia*, 2001), 1.

Samad, Zainuddin. 2016. *Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Ombak : Yogyakarta

Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia*. Kencana Premedia Group. Jakarta

Skripsi/Thesis

Ahyar. (2022). *Tatakelola Pemerintah yang Inovatif di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sidenreng Rappang: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Online Newspaper

Penulis, A. (Tahun, Bulan Tanggal Terbit). Judul artikel. Judul Koran, Diperoleh dari URL beranda surat kabar

Muslimin Emba. (23, September 2022). Viral' Korban Travel di Makassar Pasang Iklan Billboard 'Tolong Kembalikan Uang Kami'. *Tribun Makassar*, <https://makassar.tribunnews.com/>